

ABSTRAK

Penetapan pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi atau memberantas kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan, sehingga penetapan suatu kebijakan tentunya akan menimbulkan pro dan kontra terhadap pidana mati. Meskipun demikian, hukuman mati di Indonesia bukanlah hukuman yang dilarang. Penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang narkoba sebagaimana dikenal dengan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkoba. Hukuman pidana mati merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan untuk mencegah dan menimbulkan efek jera para pelaku tindak pidana. Pasal 114 (2) UU Narkoba menunjukkan secara tegas bagaimana peran hukum di Indonesia terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman. Batasan dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau batang pohon melebihi 5 batang pohon atau 5 gram dalam bentuk bukan tanaman, akan dikenakan hukuman yang paling berat berdasarkan ketentuan perundang-undangan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pidana mati bagi terpidana narkoba di Indonesia dibenarkan, dan apakah pelaksanaan pidana mati dalam kasus Fredi Budiman sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai ilorma atau doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajar apabila pelanggaran atas pasal 114 ayat 2 UU Narkoba dijatuhi pidana mati apabila penyalahgunaan narkoba golongan I dilakukan dalam jumlah besar. Selain itu, pelaksanaan pidana mati terhadap Fredi Budiman juga telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang dalam hal ini adalah UU Narkoba dan UU No. 39 Tahun 2009 tentang HAM. Hal tersebut sesuai dengan putusan pengadilan dimana ketentuan pasalnya yang dilanggar menyatakan pidana mati sebagai sanksi pidananya, karena ketentuan pasal 114 ayat 2 tertera pidana mati sebagai sanksi pidana yang diabsorpsi kedalam putusan Pengadilan Negeri sebagai *Yudexfacti* awal yang diikuti dan disetujui dalam putusan *Yudexyures* (Mahkamah Agung) dengan pidana mati pula.

Kata Kunci : Pidana Mati, Narkoba, Pasal 114 Ayat (2) UU Narkoba

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN THESIS..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI THESIS..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5. Metode Penelitian..... | 11 |
| 1.5.1. Tipe penelitian..... | 11 |
| 1.5.2. Pendekatan Masalah..... | 11 |
| 1.5.3. Sumber Penelitian Hukum | 11 |
| 1.6. Langkah Penelitian..... | 12 |
| 1.6.1. Pengumpulan Bahan Hukum..... | 12 |
| 1.6.2. Langkah Analisis Bahan Hukum..... | 13 |
| 1.7. Pertanggungjawaban Sistematika | 13 |
| | |
| BAB II HAKEKAT PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA..... | 16 |
| 2.1. Penerapan Pidana Mati di Indonesia Menurut Hukum Positif | 16 |
| 2.2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika Beserta Akibatnya Bagi Korban | 31 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGRI JAKARTA BARAT NOMOR : 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR., KASUS FREDI BUDIMAN | 43 |
| 3.1. Kasus Fredi Budiman Melalui Penerapan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika | 43 |
| 3.2. Analisis Penjatuhan Pidana Mati Dalam Kasus Fredi Budiman | 49 |
| BAB IV PENUTUP | 55 |
| 4.1. Kesimpulan | 55 |
| 4.2. Saran..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 5 |